

ABSTRAK

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri selama menjalani proses pidana. Untuk mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga masyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Masyarakatan atau biasa disebut BAPAS. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakatan dari Pembimbing Masyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fungsi Balai Masyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak dan menganalisa jika putusan pengadilan tidak mempertimbangkan hasil putusan Balai Masyarakatan.

Balai Masyarakatan memiliki peran dan kewenangan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak karena penelitian bapas merupakan sebagai acuan dan pedoman hakim dalam memutus perkara pidana anak karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengamanahkan bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak maka anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi melalui keterlibatan BAPAS sehingga hasil Penelitian Masyarakatan (PK) berkualitas sehingga menjadi pertimbangan aparat hukum yang lain khususnya hakim. Hubungan Laporan Penelitian Masyarakatan terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak bahwa hasil Penelitian Masyarakatan akan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak dengan memperhatikan kenakalan anak, hubungan orang tua dengan anak, keadaan sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga dan anak terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Balai Masyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

A child is by his nature still has a sense of reasoning that is not good enough to distinguish good and bad things. Crimes committed by children in general are a process of imitating or being influenced by adult persuasion. The formal criminal justice system which ultimately places children in prison status certainly has significant consequences in terms of child development. The process of punishment given to children through the formal criminal justice system by putting the child in prison apparently did not succeed in making a child deterrent and become a better person to support his growth and development process. Prisons often make children more professional in committing crimes.

A child is by his nature still has the power of reasoning In this case when a child commits an illegal act then the child is sentenced to a criminal sentence, then the child will undergo a criminal term in prison but imprisonment greatly affects the child's mental development. Children will lose confidence and self-identity during the criminal process. To restore children's trust, one of the units outside the correctional institution whose role is to restore the dignity of the child is the Penitentiary or commonly called BAPAS. In Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal System Article 60 paragraph (3) it is stated that the Judge is obliged to consider the social research report from the Social Supervisor before giving a case verdict which is not good enough to distinguish good from bad. Crimes committed by children in general are a process of imitating or being influenced by adult persuasion. The formal criminal justice system which ultimately places children in prison status certainly has significant consequences in terms of child development. The process of punishment given to children through the formal criminal justice system by putting the child in prison apparently did not succeed in making the child deterrent and become a better person to support his growth and development process. Prisons often make children more professional in committing crimes.

This study aims to analyze the function of the Penitentiary in the juvenile justice system and analyze if the court's decision does not consider the results of the Penitentiary's decision.

Penitentiary has a very important role and authority in the settlement of juvenile criminal cases because bapas research is a reference and guide for judges in deciding child criminal cases because Law Number 11 of 2012 concerning the Anaksudah Criminal Justice System mandates that in the best interest of children, children those dealing with the law must be protected through the involvement of BAPAS so that the results of the Community Research (PK) are of good quality so that they become the consideration of other legal apparatus, especially judges. Relationship of Community Research Reports on the imposition of criminal sanctions for children that the results of Community Research will provide instructions for Judges about what actions or penalties should be imposed on a child by paying attention to the delinquency of the child, the relationship of parents with children, the socio-economic situation of the family, family and child relations towards surrounding environment.

Keyword : *Penitentiary, Criminal Justice System of Children*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan hikmat yang dilimpahkan-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, dosen-dosen serta sahabat-sahabat penulis.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun judul Tesis ini adalah: **“PERTIMBANGAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**. Di dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para dosen pembimbing: Dr. Sarwirini S.H., M.S. dan Amira S.H., LL.M., Ph.D. dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Ucapan terima kasih di sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Pembantu Dekan yang telah mendukung kelancaran studi bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta staf yang telah melayani berbagai kepentingan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.hum., Ibu Dr. Sarwirini S.H., M.S., Ibu Amira S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Riza Alifianto Kurniawan S.H., MTCP, serta Bapak Sapta Aprilianto S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberi masukan dan pengarahan dengan sabar dan penuh tanggung jawab demi memperbaiki penulisan tesis penulis.
4. Orang tua tercinta yang tak henti-hentinya dengan kasih sayang dan cinta selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
5. Istri yang senantiasa membersamai untuk selalu memberikan motivasi, perhatian dan doa kepada penulis.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik yang telah memberikan izin waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
7. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

Diecky Eka Koes Andriansyah

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.